

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA BPJS KESEHATAN KANTOR PUSAT**

FARHAN ARYO ABIMANYU

8215155564



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019**

**INTERNSHIP REPORT
AT BPJS KESEHATAN KANTOR PUSAT**

FARHAN ARYO ABIMANYU

8215155564



**This Internship Report was written to fulfill
one of the requirements for Bachelor Degree of Economics
in Faculty of Economics at Universitas Negeri Jakarta**

**BACHELOR DEGREE OF MANAGEMENT
FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019**

ABSTRAK

Farhan Aryo Abimanyu. Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Manajemen Keuangan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 1 Agustus – 3 Oktober 2018. Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah pengalaman dan melatih diri untuk bekerja. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Manajemen Iuran di BPJS Kesehatan Kantor Pusat. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain: memantau pendapatan (iuran) berdasarkan segmen peserta, membuat *dashboard* iuran, memverifikasi data iuran peserta dengan aplikasi keuangan, merekapitulasi data upaya pengumpulan tunggakan iuran, merekapitulasi dan memverifikasi data iuran peserta yang ditanggung APBD (Jamkesda), merekapitulasi proyeksi iuran dari Jamkesda, serta memverifikasi data iuran peserta yang harus dikembalikan.

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), BPJS Kesehatan, Manajemen Iuran, Pendapatan, Iuran Peserta, Jamkesda, *Limited Collecting Program*, *Refund*

ABSTRACT

Farhan Aryo Abimanyu. Internship Report at Contribution Management of BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih, Central Jakarta August 1st – October 3rd 2018. Management Major at Faculty of Economics in Universitas Negeri Jakarta.

The purpose of internship for internee is to enhance experience and train the internee for preparation to work in the future. The internee perform the internship at Contribution Management in BPJS Kesehatan. The internee's job are monitoring income (contribution) based on customer segment, creating contribution dashboard, verifying customer contribution data with financial application, recapitulating efforts to collect contributions arrears data, recapitulating and verifying customer contribution paid by government data, recapitulating contribution projection from governmen, and verifying costumer contribution data that have to be refunded..

Keywords: Internship, Contributiom Management, BPJS Kesehatan, Income, Customer Contribution, Jamkesda, Limited Collecting Program, Refund

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



UQAS

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION

SURAT PERSETUJUAN SIDANG PKL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dosen Pembimbing

1. Nama : Dra. Umi Mardiyati, M.Si
2. NIP : 195702211985037002
3. Tanda tangan : *(Mrd 29/12 2018)*

Memberikan Persetujuan kepada Mahasiswa dibawah ini :

1. Nama : FARHAN ARYO ABIMANYU
2. No. Registrasi : 8215155564
3. Program Studi : SI MANAJEMEN
4. Judul PKL : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA
BPJS KESEHATAN KANTOR PUSAT

Untuk Mengikuti/ ~~Tidak Mengikuti~~ * Sidang PKL pada tanggal.....

Mengetahui,
Koordinator Prodi SI Manajemen FE UNJ

Andrian Haro, S.Si, MM
NIP. 19850924 201404 1 002

Jakarta, ...27...Desember 2018

Mahasiswa Ybs,

FARHAN ARYO A
No.Reg : 8215155564

Cat : coret yang tidak perlu *)

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Andrian Haro, S.Si, M.M

NIP. 198509242014041002

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Ketua Penguji

Andrian Haro, S.Si, M.M

NIP. 198509242014041002



1/2/19

Penguji Ahli

Destria Kurnianti, S.E, M.Sc

DPK

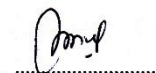


30/1/19

Dosen Pembimbing

Dra. Umi Mardiyati, M.Si

NIP. 195702211985032002



30/1/19

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPJS Kesehatan Kantor Pusat ini dengan baik. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, yaitu:

- a. Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- b. Andrian Haro S.Si., M.M, selaku Koordinator Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- c. Dra. Umi Mardiyati M.Si, selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan.
- d. Keluarga praktikan atas doa dan dukungannya
- e. Bapak Agus Mustopa selaku Deputy Direksi Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Kantor Pusat
- f. Ibu Helti Endrasari selaku Asisten Deputy Manajemen Iuran Peserta Non PPU dan PBI BPJS Kesehatan Kantor Pusat.
- g. Agung Dermawan selaku Staf Manajemen Iuran Peserta Non PPU dan PBI BPJS Kesehatan Kantor Pusat.
- h. Semua staf BPJS Kesehatan Kantor Pusat, khususnya rekan-rekan di Manajemen Iuran.

- i. Para sahabat dan rekan-rekan di S1 Manajemen C 2015
- j. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dan telah membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu praktikan sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, 4 Oktober 2018

Farhan Aryo Abimanyu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan PKL.....	2
1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan	3
1.4 Tempat Pelaksanaan PKL.....	5
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL	5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	7
2.1 Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan	7
2.2 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	9
2.3 Struktur Organisasi	15
2.4 Tugas Utama	16

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	19
3.1 Bidang Kerja.....	19
3.2 Pelaksanaan Kerja.....	19
3.3 Kendala Yang Dihadapi.....	34
3.4 Cara Mengatasi Kendala.....	34
BAB IV KESIMPULAN.....	36
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
II.1	Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Pusat.....	16
III.1	Tren Pendapatan Iuran Segmen PBPU per Hari, per Minggu, dan per Bulan Selama Tahun 2018	21
III.2	Tren Pendapatan Iuran Segmen PPU per Hari, per Minggu, dan per Bulan Selama Tahun 2018	22
III.3	Tren Pendapatan Iuran Segmen PBI APBD per Hari, per Minggu, dan per Bulan Selama Tahun 2018	22
III.4	Lampiran Pendapatan Iuran Bulan Agustus 2018.....	23
III.5	Lampiran Berkas Rekapitulasi Pembayaran Tunggalan Iuran Melalui Koprus Bulan Agustus 2018 yang Sudah Diverifikasi dengan Aplikasi Keuangan.....	26
III.6	Lampiran Berkas Rekapitulasi Pembayaran Tunggalan Iuran Melalui Promo Traveloka Periode 24-30 Agustus 2018 yang Sudah Diverifikasi dengan Aplikasi Keuangan.....	27
III.7	Aplikasi Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Pusat	28
III.8	Lampiran Pendapatan Iuran Jamkesda Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Juli 2018	31
III.9	Lampiran Proyeksi Pendapatan Iuran Jamkesda Daerah Sumatera Selatan	32
III.10	Lampiran Data Iuran Peserta yang Harus Dikembalikan Karena Pembayaran Dobel Melalui Bank Mandiri	33

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Lamaran PKL	40
Lampiran 2	Daftar Hadir PKL	41
Lampiran 3	Daftar Nilai PKL.....	42
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai PKL.....	43
Lampiran 5	Daftar Tugas Harian	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan magang bagi mahasiswa di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan dan merupakan mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya PKL, mahasiswa akan mendapatkan wawasan terhadap dunia kerja dan mahasiswa dapat mengetahui kompetensi dan keterampilan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan.

Kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi pihak Universitas Negeri Jakarta karena kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini mahasiswa di universitas tersebut. Hal ini dikarenakan PKL merupakan sarana yang penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja yang nyata. Kegiatan PKL ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia kerja dan sekaligus sebagai perkembangan kompetensi di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, pentingnya PKL ini adalah agar mahasiswa bisa belajar bekerja dan mengimplementasikan teori-teori yang sudah diajarkan pada bangku kuliah serta pengalaman yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Dengan demikian, ilmu dan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah serta implementasinya yang dilakukan saat PKL menjadi kompetensi yang dimiliki mahasiswa saat menghadapi dunia kerja.

Pada kegiatan PKL kali ini, praktikan mendapatkan kesempatan melakukan PKL di BPJS Kesehatan Kantor Pusat di Manajemen Iuran sebagai Asisten Staf Manajemen Iuran Peserta Non Peserta Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). PKL ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman praktikan untuk belajar menghadapi dunia kerja khususnya di bidang keuangan serta dapat mengasah kemampuan berinteraksi sosial terhadap lingkungan kerja nyata.

Praktikan memilih BPJS Kesehatan Kantor Pusat sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan alasan karena BPJS Kesehatan adalah salah satu perusahaan BUMN yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan terdiri dari tiga belas Kedeputan Wilayah (Kepwil) dan banyak kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan memberikan jaminan atau asuransi kesehatan kepada seluruh pesertanya. Pada awal 2014, PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan sehingga seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Segmen peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga segmen yaitu Peserta Penerima Upah (PPU), Peserta Non PPU, dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, terdiri dari tiga kelas yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III. Praktikan memutuskan PKL di kantor pusat karena semua data terhimpun di kantor pusat dari seluruh kepwil dan kantor cabang yang membuat praktikan dapat memperoleh ilmu lebih banyak. Masalah keuangan pada BPJS Kesehatan muncul dari tahun ke tahun yang menjadi sorotan publik sehingga praktikan tertarik untuk mencari tahu permasalahannya.

1.2. Maksud dan Tujuan PKL

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah:

a. Maksud Praktik Kerja Lapangan

- a. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.
- b. Memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi praktikan dalam menerapkan teori yang di peroleh selama di bangku kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan.
- c. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa teori dan praktek yang telah didapatkan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan.
- d. Mempelajari bidang kerja manajemen keuangan yang lebih terperinci ke manajemen iuran pada perusahaan yaitu BPJS Kesehatan Kantor Pusat
- e. Memberikan kontribusi terhadap bagian di tempat praktek kerja, dalam hal ini di Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

b. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

- a. Mengetahui apa masalah utama pada BPJS Kesehatan sehingga mengalami defisit anggaran hingga triliyunan rupiah.
- b. Mengenal kondisi dan lingkungan yang terjadi dalam dunia kerja nyata di institusi pemerintahan yakni BUMN seperti BPJS Kesehatan.
- c. Menciptakan, mengasah, dan membangun sifat-sifat serta kompetensi yang penting untuk dimiliki ketika memasuki dunia kerja agar bermanfaat bagi pemerintah, institusi, serta masyarakat.

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan melaksanakan kegiatan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat diharapkan antara lain:

1. Kegunaan Bagi Praktikan

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai pengetahuan yang telah di peroleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian serta kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.
- c. Membentuk mental yang kuat untuk mahasiswa dalam menjadi tenaga kerja yang baik serta melatih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- d. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
- e. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan yang belum dikuasai praktikan dalam bidang keuangan, untuk selanjutnya praktikan usahakan untuk memperbaiki atau menguasai kekurangan tersebut sebelum memasuki dunia kerja.

2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang professional dan berpengalaman
- b. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu Universitas yang mempunyai bibit-bibit unggul.
- c. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan perusahaan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di kemudian hari.

- d. Mendapatkan umpan balik (*feedback*) berupa saran dan kritik untuk menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya.

c. Kegunaan bagi BPJS Kesehatan

- a. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Adanya kemungkinan menjalin hubungan yang teratur dan dinamis antara instansi atau perusahaan dengan lembaga perguruan tinggi.

1.4. Tempat Pelaksanaan PKL

Nama Instansi/Perusahaan : BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Alamat : Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Website : <https://bpjs-kesehatan.go.id/>

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan terdiri dari beberapa rangkaian tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuhan dan administrasi yang diperlukan. Dimulai dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada BAAK UNJ yang ditunjukan kepada BPJS Kesehatan Kantor Pusat, kemudian setelah surat tersebut keluar, praktikan segera mengajukan surat tersebut ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di BPJS Kesehatan Kantor Pusat dan ditempatkan di Manajemen Iuran sebagai Asisten Staf Manajemen Iuran Peserta Non PPU dan PBI. Praktikan melaksanakan PKL selama 40 (Empat Puluh Hari) hari kerja, terhitung dari 1 Agustus 2018 sampai dengan 3 Oktober 2018. Praktikan melakukan PKL dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB, dengan waktu istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan sebagai bukti telah melaksanakan PKL di BPJS Kesehatan Kantor Pusat. Pembuatan laporan ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (*universal health insurance*) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini.

Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.

Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero).

Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

2.2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya

2. Misi Perusahaan

- a. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
- b. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
- c. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- d. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- e. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.

3. Budaya Perusahaan

Perilaku duta BPJS Kesehatan harus sesuai dengan tata nilai organisasi selaras dengan semangat Revolusi Mental. Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat (Pemerintah & rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali Nilai-Nilai Strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik mendukung implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, melalui penyelarasan butir-butir perilaku yang tertuang dalam Nilai Utama Revolusi Mental dengan Tata Nilai Organisasi.

Melalui Revolusi Mental, diharapkan mampu mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku Duta BPJS Kesehatan sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan Visi Organisasi, yaitu Cakupan Semesta 2019. Seluruh Duta BPJS Kesehatan tentunya ingin melakukan hal yang terbaik untuk diri sendiri dan khususnya bagi kemajuan organisasi BPJS Kesehatan.

Setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi menuntut kesiapan dari seluruh Duta BPJS Kesehatan dalam menghadapi beban tugas dan tanggung jawab yang semakin berat. Bekerja dengan penuh integritas, profesional dalam memberikan pelayanan yang prima melalui perencanaan program yang tepat dan anggaran rasional adalah nilai – nilai yang diharapkan stakeholder, mitra kerja dan peserta tercermin dalam cara kerja Duta BPJS Kesehatan.

Tata Nilai Organisasi (organization values) BPJS Kesehatan merupakan pondasi dasar yang penting bagi organisasi dalam menanamkan nilai – nilai yang diinginkan atau diharapkan menjadi nilai – nilai individu dalam menghadapi dinamika perubahan organisasi. Pedoman perilaku Duta BPJS Kesehatan ini akan

mendefinisikan bagaimana Duta BPJS Kesehatan harus berperilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan sebagai perwakilan BPJS Kesehatan.

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, organisasi membutuhkan budaya perusahaan dalam bentuk 10 perilaku utama dan 4 tata nilai organisasi.

a. Perilaku Utama

Perilaku utama duta BPJS Kesehatan antara lain:

- 1) Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu / kelompok
- 2) Selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan
- 3) Berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan
- 4) Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan
- 5) Mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja
- 6) Berpikir positif dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan
- 7) Bersikap proaktif terhadap kebutuhan peserta
- 8) Berempati dan sabar dalam melayani peserta
- 9) Merencanakan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan
- 10) Hemat dan rasional dalam penggunaan anggaran

b. Tata Nilai Organisasi BPJS Kesehatan

Tata nilai organisasi BPJS Kesehatan yaitu:

- 1) **Integritas.** Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya.

Perilaku yang diharapkan dan implikasinya:

- a) Berani berkata benar dan melaporkan sesuai fakta yang ada

- b) Berlaku jujur dan adil baik terhadap atasan, bawahan, rekan sekerja, mitra dan peserta
- c) Bersikap rendah hati, dapat dipercaya dan bertanggungjawab
- d) Mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap organisasi.

Perilaku yang tidak diharapkan dan implikasinya:

- a) Manipulasi data, informasi dan laporan untuk kepentingan pribadi dan kelompok
- b) Menerima gratifikasi dari pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- c) Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan di luar kedinasan
- d) Sengaja membocorkan rahasia dan menceritakan keburukan organisasi kepada pihak luar
- e) Membiarkan kecurangan terjadi tanpa mengambil tindakan tegas atau melaporkannya.

- 2) **Profesional.** Profesional merupakan karakter melaksanakan tugas dengan kesungguhan, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan.

Perilaku yang diharapkan dan implikasinya:

- a) Memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan
- b) Tepat waktu, disiplin dan teliti dalam mengelola tugas dan pekerjaan
- c) Bekerja cekatan, dan antisipatif terhadap potensi masalah
- d) Berpikir kreatif–inovatif dan bersikap proaktif dalam melakukan perbaikan proses kerja
- e) Berpenampilan rapi dan bersikap sopan

Perilaku yang tidak diharapkan dan implikasinya:

- a) Memilih rekan dan jenis pekerjaan yang diminati
- b) Menunda penyelesaian tugas dan pekerjaan
- c) Melemparkan tanggung jawab kepada orang lain
- d) Bekerja sendiri tanpa melakukan komunikasi dan koordinasi
- e) Merasa paling pintar dan enggan membagi ilmu dengan yang lain
- f) Lalai memakai atribut kedinasan sesuai ketentuan.

- 3) **Pelayanan Prima.** Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada seluruh peserta.

Perilaku yang diharapkan dan implikasinya:

- a) Memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa membeda – bedakan
- b) Ramah, tanggap, dan informatif
- c) Sabar menghadapi kebutuhan pelayanan dari peserta
- d) Fasih menjelaskan dan memberikan bantuan dengan cepat dan tepat.

Perilaku yang tidak diharapkan dan implikasinya:

- a) Lamban merespon kebutuhan peserta
- b) Kualitas pelayanan tidak konsisten
- c) Menyalahkan dan tidak mencari jalan keluar masalah
- d) Bicara tidak sopan, bersikap merendahkan dan tidak peduli dengan kebutuhan orang lain
- e) Merasa lebih penting dari peserta, mitra, dan rekan sekerja lain

- 4) **Efisiensi Operasional.** Efisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional sesuai dengan kebutuhan.

Perilaku yang diharapkan dan implikasinya:

- a) Menyusun perencanaan program kerja yang selaras dan tidak tumpang tindih
- b) Taat prosedur dan menjaga kualitas dalam mengelola pekerjaan
- c) Melaksanakan program kerja secara tepat waktu, tepat anggaran dan sesuai spesifikasi
- d) Melakukan pengelolaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja secara berkala
- e) Menetapkan skala prioritas pekerjaan berdasarkan kepentingan organisasi

Perilaku yang tidak diharapkan dan implikasinya:

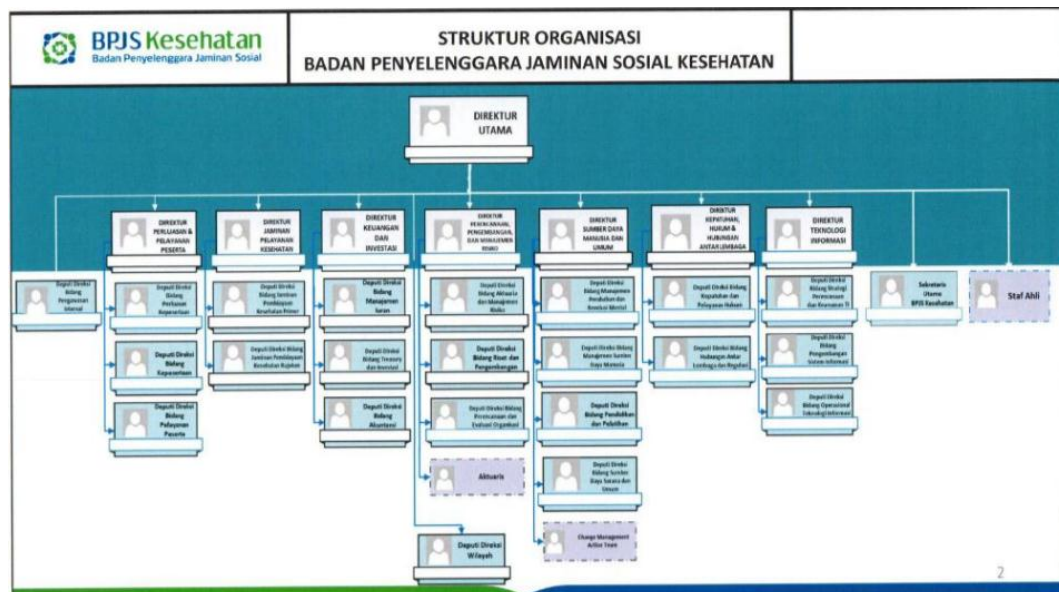
- a) Mempersulit proses penyelesaian pekerjaan yang sesungguhnya bisa dipermudah
- b) Pengambilan keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang seksama
- c) Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun
- d) Melibatkan pihak lain yang tidak menambah nilai dalam proses penyelesaian pekerjaan
- e) Terikat hanya mengerjakan rutinitas tanpa gagasan peningkatan proses kerja

2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017 merupakan dasar bagi organisasi dalam menjalankan operasional organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini. Ketentuan mengenai uraian tugas dan tanggung jawab setiap jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direksi ini diatur dengan Peraturan Direksi tersendiri. Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini maka Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2015, tetap berlaku selama masa transisi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender

Pada saat masa transisi berakhir, Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Direksi ini mulai berlaku 31 Mei 2017.

Struktur organisasi tersebut tergambar dalam **gambar II.1**:



Gambar II.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Sumber: Surat Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2017

2.4 Tugas Utama

1. Direktur Utama, dengan tugas utamanya memimpin dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, membuat kebijakan umum dan mengambil keputusan strategis BPJS Kesehatan serta bertindak sebagai koordinator Direksi.
2. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan yang terkait dengan kegiatan operasional yaitu meliputi kebijakan kepesertaan, Pemasaran dan hubungan pelanggan serta mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Direktur Pelayanan, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan yang terkait dengan kegiatan operasional yaitu meliputi kebijakan pelayanan, jaminan pelayanan kesehatan dan obat, promosi dan evaluasi pelayanan kesehatan,

kemitraan dengan fasilitas kesehatan serta mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan, dengan tugas utamanya menyiapkan perencanaan BPJS Kesehatan jangka pendek dan jangka panjang dan laporan manajemen BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi atas kinerja BPJS Kesehatan secara reguler, melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait dengan core proses BPJS Kesehatan, pengelolaan aktuarial dan pengelolaan risiko yang efektif dan efisien serta mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.
5. Direktur Keuangan dan Investasi, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan mengenai akuntansi, investasi dan keuangan serta mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.
6. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi dan Sumber Daya Sarana (SDS) serta mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.
7. Direktur Teknologi Informasi, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan mengenai teknologi diantaranya tersedianya kebijakan strategis dan layanan teknologi informasi melalui perencanaan, perancangan, pengembangan, dan implementasi, serta pemeliharaan jaringan dan infrastruktur

diseluruh unit kerja guna mendukung tersedianya Sistem Informasi Manajemen BPJS Kesehatan yang handal dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

8. Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan terkait dengan hukum dan regulasi, terjalinnya hubungan kemitraan dengan Lembaga Negara dan atau Lembaga / Organisasi terkait lainnya melalui pengembangan konsep dan strategi, serta komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar lembaga guna mendukung dan operasionalisasi BPJS Kesehatan

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Bidang Kerja

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, praktikan ditempatkan di Manajemen Iuran sebagai Asisten Staf Manajemen Iuran Peserta Non PPU dan PBI. Tugas praktikan selama melaksanakan PKL adalah:

1. Memantau pendapatan (iuran) berdasarkan segmen peserta dan membuat dashboard pendapatan
2. Merekapitulasi data upaya pengumpulan tunggakan iuran dengan program *Limited Collecting Program* (LCP) serta memverifikasi data iuran peserta dengan aplikasi keuangan
3. Merekapitulasi dan memverifikasi data pendapatan iuran peserta yang ditanggung APBD (Jamkesda) serta merekapitulasi proyeksi pendapatan iuran dari Jamkesda
4. Memverifikasi data iuran peserta yang harus dikembalikan (*refund*)

3.2 Pelaksanaan Kerja

Praktikan mulai melaksanakan PKL pada hari Rabu, 1 Agustus 2018. Praktikan diberikan gambaran secara umum mengenai cara kerja dan etika kerja di BPJS Kesehatan Kantor Pusat oleh manajer. Selain itu, praktikan juga diberikan informasi tentang situasi BPJS Kesehatan yang sedang mengalami masalah terutama pada defisit anggaran yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah yang sedang diperbincangkan di khalayak publik. Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PKL di BPJS Kesehatan Kantor

Pusat, berikut adalah penjelasan terperinci mengenai beberapa tugas yang dikerjakan oleh praktikan:

1. Memantau pendapatan (iuran) berdasarkan segmen peserta dan membuat *dashboard* pendapatan

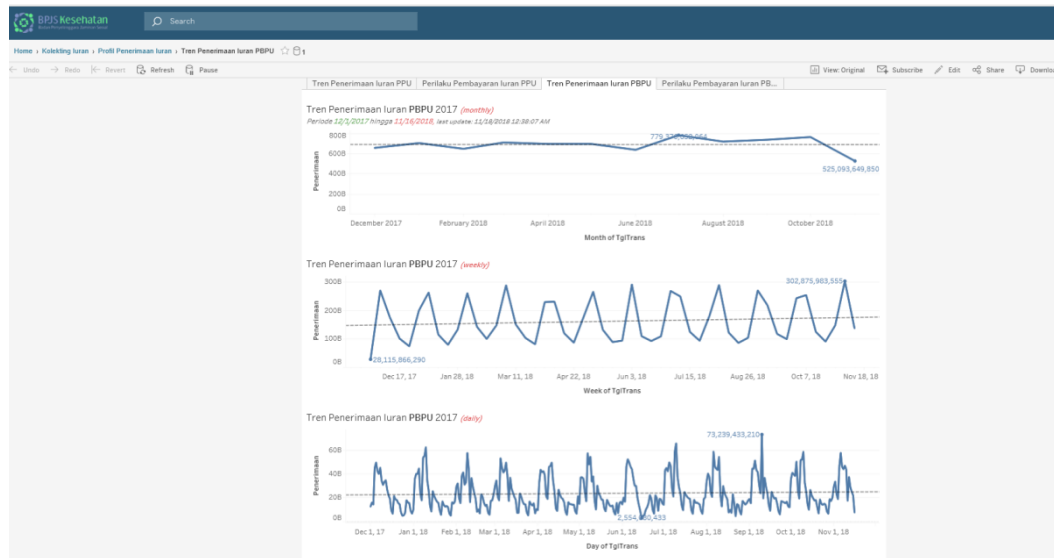
Pendapatan yang diterima oleh BPJS Kesehatan yaitu berupa iuran peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU), dan Penerima Bantuan Iuran APBD (PBI APBD). BPJS Kesehatan menetapkan tarif iuran berdasarkan kelas yaitu kelas I sebesar Rp80.000,00 per orang per bulan, kelas II sebesar Rp51.000,00 per orang per bulan, dan kelas III sebesar Rp25.500,00 per orang per bulan.

Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk memantau pendapatan berdasarkan segmen peserta yang sudah diakumulasi dari semua saluran pembayaran. Saluran pembayaran iuran BPJS Kesehatan yaitu bank, *retail shop*, dan *e-commerce*. Praktikan harus memantau pendapatan yang masuk dengan periode harian, mingguan, dan bulanan. Praktikan memantau pendapatan berupa grafik maka praktikan kemudian membuat laporan berupa *excel*. Setelah itu, praktikan harus membuat *dashboard* pendapatan dan diserahkan kepada manajer untuk dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan antara lain:

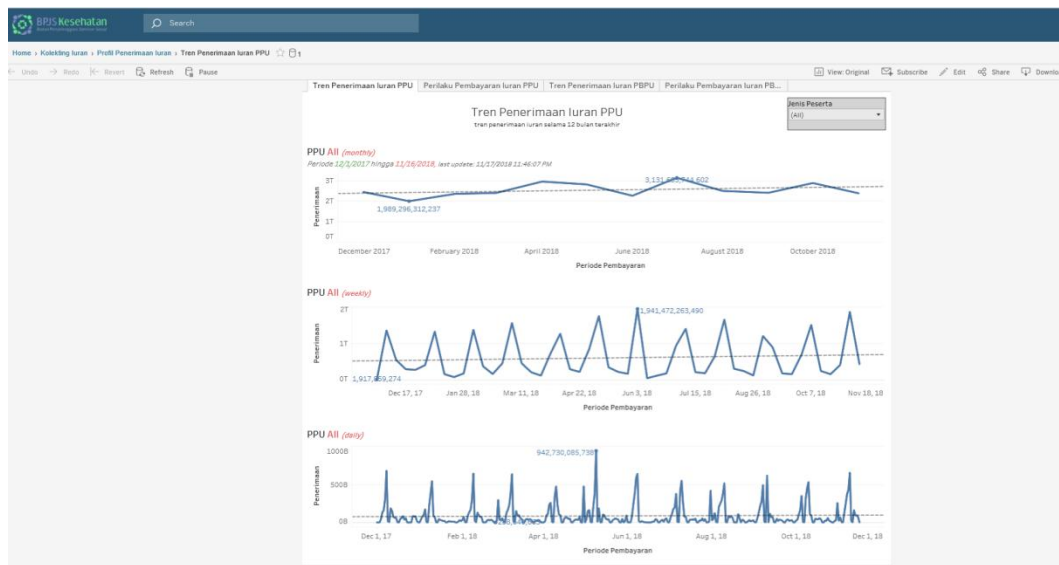
- a. Praktikan membuka *website* <https://bi.bpjs-kesehatan.go.id>
- b. Praktikan *login* dan membuka kolom pendapatan
- c. Praktikan memilih segmen peserta
- d. Praktikan mengunduh semua data pendapatan dari setiap segmen dan periode satu per satu
- e. Praktikan membuat laporan pendapatan berupa *excel*

- f. Praktikan membuat *dashboard* dan menempel *dashboard* di papan ruang kerja untuk kemudian dipelajari oleh manajer.



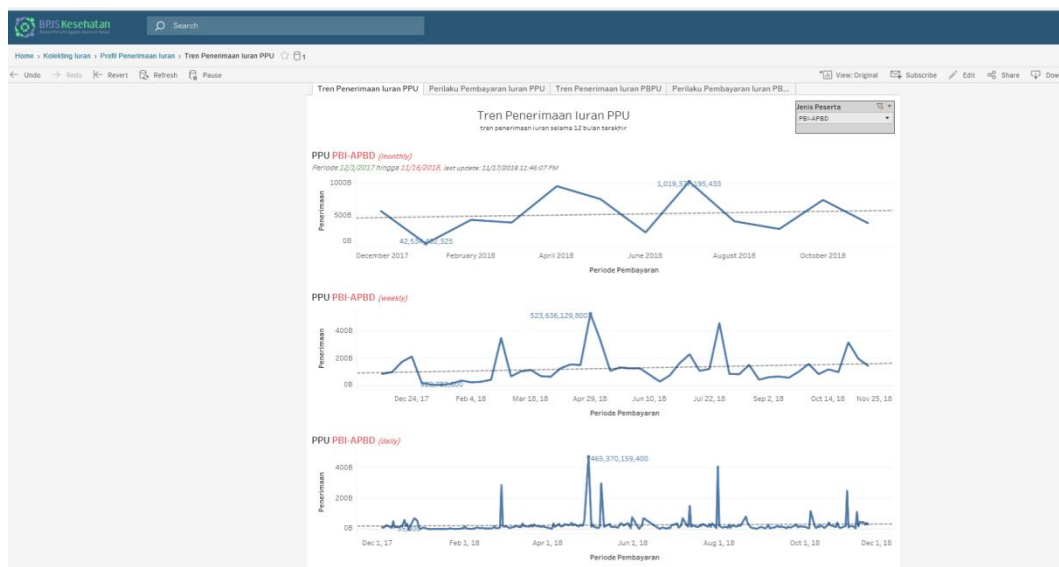
Gambar III.1 Tren Pendapatan Iuran Segmen PBP per Hari, per Minggu, dan per Bulan Selama Tahun 2018

Sumber: <https://bi.bpjs-kesehatan.go.id>



Gambar III.2 Tren Pendapatan Iuran Segmen PPU per Hari, per Minggu, dan per Bulan Selama Tahun 2018

Sumber: <https://bi.bpjs-kesehatan.go.id>



Gambar III.3 Tren Pendapatan Iuran Segmen PBI APBD per Hari, per Minggu, dan per Bulan Selama Tahun 2018

Sumber: <https://bi.bpjs-kesehatan.go.id>

Sumber: Diolah oleh praktikan

Perjalanan di tahun ke-4 program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) banyak menemui tantangan besar. Sustainability program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan harus dipertahankan agar kemanfaatan program ini dapat terus dirasakan oleh penduduk Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan terkompleks dari semua segmen peserta ada pada segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU). Pertumbuhan peserta segmen ini berbanding terbalik dengan tingkat penerimaan iurannya. Persentase kolektabilitas iuran segmen PBBU relatif sulit untuk mencapai angka >60%. Total tunggakan iuran peserta segmen PBBU untuk umur tunggakan >4 bulan mencapai lebih dari 5,2 triliun rupiah.

Tentunya dipertukan strategi khusus dan menarik agar kemauan dan kemampuan membayar iuran peserta PBPU meningkat. Sejak awal tahun 2017, manajemen telah melakukan ujicoba dan implementasi berbagai program di antaranya Program

Kader JKN-KIS. Dalam implementasinya, setiap Kader JKN-KIS yang berhasil mengumpulkan tunggakan iuran dari peserta binaannya, akan diberi imbal jasa berupa Imbal Jasa Pengumpul yang besarnya 25% dari tunggakan yang terkumpul. Sejak Implementasi besaran imbal jasa tersebut dibulan Oktober 2017, telah terlihat adanya peningkatan kinerja pengumpulan tunggakan iuran oleh Kader JKN-KIS walaupun belum signifikan.

Dengan memperhatikan tren yang berkembang saat ini, di mana masyarakat lebih tertarik terhadap program-program yang memberikan insentif untuk mau membeli atau membayar sesuatu, maka dipandang perlu dikembangkan program yang dapat menarik perhatian dan keinginan peserta PBPU menunggak untuk melunasi tunggakannya, yaitu melalui *Limited Collection Program* (LCP). Secara singkat dijelaskan bahwa program ini akan memberikan insentif kepada peserta PBPU menunggak yang telah melunasi tunggakannya dengan besaran insentif maksimal sebesar yang diberikan kepada Kader JKN-KIS yaitu 25%. Peserta yang akan mengikuti program ini diharuskan untuk membuka Tabungan Sehat atau memberikan nomor rekening bank yang telah bekerjasama, yang akan menjadi tempat penyimpanan insentif ketika peserta PBPU menunggak tersebut telah melunasi tunggakan iurannya 100% ke BPJS Kesehatan melalui mekanisme dan *channel* yang telah ditetapkan.

Untuk lebih meningkatkan kolektabilitas iuran khususnya dari peserta PBPU yang menunggak, manajemen berencana untuk mengeluarkan sebuah program stimulus pembayaran kepada peserta PBPU dengan nama *Limited Collection Program* (LCP). Program LCP adalah program pengumpulan iuran bagi peserta PBPU dengan memberikan program promo (*cash back*, diskon produk tertentu, atau manfaat lainnya) yang dikerjasamakan dengan lembaga keuangan bank dan non-bank maupun lainnya dengan masa periode terbatas.

Pada tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk merekapitulasi data upaya pengumpulan tunggakan iuran dengan program LCP yang bekerja sama dengan Koperasi Nusantara (Kopnus) dan Traveloka. Kopnus memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan dengan memberikan pinjaman untuk melunasi tunggakan iuran. Kemudian BPJS Kesehatan memberikan *fee* sebesar 1,1% kepada Kopnus per transaksi. Di sisi lain, Traveloka memberikan *cash back* sebesar 15% kepada peserta yang membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan melalui Traveloka.

Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan antara lain:

- a. Praktikan melakukan pengecekan *email* yang diterima dari pihak Kopnus dan Traveloka
- b. Apabila sudah ada *email* yang diterima dari Kopnus dan Traveloka, praktikan merekapitulasi data pembayaran tunggakan iuran dari dua lembaga tersebut
- c. Setelah direkap, praktikan harus membuat laporan dengan memverifikasi apakah data yang diberikan Kopnus dan Traveloka sesuai dengan yang diterima oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi keuangan BPJS Kesehatan
- d. Kemudian praktikan membuat dan mengirim *feedback*. Untuk Kopnus, *feedback* dibuat dan dikirim pada akhir bulan. Sementara untuk Traveloka, *feedback* dibuat dan dikirim setiap hari kerja terakhir dalam satu pekan.

Sumber: Diolah oleh praktikan

keuangan.bpjs-kesehatan.go.id/Keuangan/FormCI/checkDataVA.aspx

Aplikasi Keuangan Kantor Pusat BPJS

07025 agung.waone 00 KANTOR PUSAT

[Home](#)
[System](#)
[Keuangan](#)
[Pooling Fund](#)
[Collecting Iuran](#)
[Iuran Non CI](#)
[Pajak](#)
[About](#)
[Logout](#)

CHECK DATA VA

Nomor VA :

Tahun : 2014

Nama :

Riwayat Pembayaran

Berisi Informasi VA yang telah diproses oleh Sistem
 Informasi : No, Tanggal Perhitungan Iuran / tertagih saat sistem kepesertaan approve tagihan, denda pada saat terhitung menurut bulan tertagih, serta informasi pembayaran iuran dari tagihan tersebut apabila sudah diproses dari sistem berdasarkan proses data ftp dari perbankan yang dikirimkan perhari serta pembayaran dendanya jika ada
 Untuk Beris terakhir digunakan sebagai kolom saldo atau sisa pebayaran dimuka yang berasal dari sisa data pembayaran

Keterangan Lain :
 Utang : Kondisi yang harus dibayar
 Belum Lunas : Terdapat Kekurangan pembayaran dibulan tersebut
 Koreksi System : Dikarenakan suatu hal (dari segala aspek yang ada disistem) untuk diabaikan (Misal : Salah Perhitungan Premi, Salah Proses Bank, Salah Inputan dll)
 Proses Ditutup : Setelah Pemrosesan pada bulan n selesai dikarenakan merupakan peserta yang bersifat hanya mendaftar pertama dan belum membayar pada bulan tersebut sehingga diabaikan
 Pending Job : Dikarenakan adanya data pembayaran iuran yang belum masuk dibulan tersebut belum diproses, maka tagihan dibulan tersebut diabaikan sampai proses selesai dan terverifikasi
 Lunas : Jika Pembayaran di bulan tersebut telah Lunas
 Saldo : Merupakan Kelebihan Bayar untuk Entitas Tersebut

kd Hit Premi	Keterangan	Tgl Premi	Iuran	Denda	Bayar Iur	Bayar Denda	Sisa Akhir	F	Nama	Status
No data to display										

Riwayat Pembayaran Bank

Berisi Informasi data FTP VA003 yang telah masuk ke sistem yang bersifat telah diproses ataupun pending proses. Tetapi data ini adalah data Acuan Utama Penerimaan Pembayaran dari Bank

Rekening Koran

Id Trans Batch	tgl Trans	kd Bank	kdcc	no VA	DK	by Premi	stati	batch No	Id Trans Bank	uraian
No data to display										

Gambar III.7 Aplikasi Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Sumber: keuangan.bpjs-kesehatan.go.id

3. Merekapitulasi dan memverifikasi data pendapatan iuran peserta yang ditanggung APBD (Jamkesda) serta merekapitulasi proyeksi pendapatan iuran dari Jamkesda

Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terbukti telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 bahwa

setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pemerintah Pusat sudah berkomitmen dan memutuskan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk kurang mampu. Sebanyak kurang lebih 40% dari total 257 juta penduduk Indonesia dibiayai negara. Mereka tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN-KIS, dengan besaran iurannya yang dibayarkan negara sebesar Rp 23.000 per orang per bulan atau sekitar Rp25 triliun dari APBN. Sedangkan sisanya adalah penduduk yang iurannya tidak dibiayai pemerintah didorong terus menerus untuk bergabung dengan program JKN-KIS.

Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau *universal health coverage* (UHC) sangatlah strategis. Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sebanyak 433 Pemda telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan Pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk di antaranya

meminta Pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS. Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional.

Selain itu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian tetap. Bahwa dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai Peserta dalam program jaminan kesehatan, maka pemerintah daerah dapat (1) Menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) Melakukan penyesuaian anggaran; (3) Melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

Pada tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk merekapitulasi dan memverifikasi data pembayaran iuran peserta yang ditanggung APBD atau program Jamkesda dari seluruh daerah di Indonesia. Data-data tersebut dihimpun dari 13 kantor Kedeputan Wilayah (Kepwil) BPJS Kesehatan. Selain itu, praktikan juga bertanggung jawab untuk merekapitulasi proyeksi pendapatan

Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan antara lain:

- a. Praktikan melakukan pengecekan *email*
- b. Apabila sudah ada *email* yang diterima dari masing-masing kantor Kepwil, praktikan merekapitulasi data pembayaran iuran yang ditanggung Jamkesda tersebut.

**Gambar III.8 Lampiran Pendapatan Iuran Jamkesda Wilayah Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Juli 2018**

Sumber: Diolah oleh praktikan

F34		05/KTR/III-06/0118																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
No		Kodeputan Wilayah	Kantor Cabang	Nama Kota / Kabupaten Temenggari Jamkesda	No VA	NO PKS	TMT PKS	Periode Pembayaran Sesuai PKS	Proyeksi Pendapatan Iuran Tahun 2018	Proyeksi Pendapatan Iuran s.d. Juni 2018	Realisasi Pendapatan s.d. Juni 2018	Realisasi Penerimaan Iuran s.d. Juni 2018	Selisih (Kurang) / Lebih Bayar	% Capaian Realisasi Pendapatan vs Proyeksi s.d. Juni	% Ketepatan Pembayaran sesuai PKS	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/11	14 = 11/10	15 = 11/15				
1	Sumatrababeling	Palembang	Benyutin	68888000373000	726.176.000-02-01-18	Des 2018 - 30 Nov 2018	Triwulanan		7.290.912.000						99,81%	82,33%	Tidak Sesuai PKS	
2	Sumatrababeling	Palembang	Musi Banyuwasin	68888000388000	157.176.000-01-01-18	Jan 2017 - 31 Des 2017	Bulanan		1.830.405.000			683.714.000	1745.322.000	99,88%	47,47%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
3	Sumatrababeling	Palembang	Ogan Komering Ilir	68888000394000	508.176.000-01-01-18	Des 2017 - 31 Des 2017	Bulanan		399.196.000	289.588.000	299.519.000	249.665.000	149.910.000	99,99%	83,34%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
4	Sumatrababeling	Palembang	Ogan Ilir	68888000403000	512.176.000-01-09-17	Ok 2017 - 31 Des 2017	Bulanan		1.003.404.000	500.802.000	495.177.000	244.181.000	133.186.000	99,10%	49,16%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
5	Sumatrababeling	Palembang	Palembang	68888000390000	292.176.000-01-01-17	Nov 2017 - 31 Des 2017	Bulanan		3.768.118.000				1261.301.000	50,81%	79,30%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
6	Sumatrababeling	Pangkepang	Provinsi Tpk. Bangka Belitung	6888800010043	118.176.000-01-01-18	15-Jan-18	Triwulanan						133.099.000	100,13%	99,34%	=====		
7	Sumatrababeling	Pangkepang	Kota Pangkalany	6888800010008	61.176.000-01-01-18	2-Jan-18	Triwulanan		3.851.788.000				14.901.000	100,00%	99,84%	=====		
8	Sumatrababeling	Pangkepang	Kabupaten Bangka	68888000108009	24.176.000-01-01-18	2-Jan-18	Triwulanan		3.969.617.000				13.382.000	99,93%	99,83%	=====		
9	Sumatrababeling	Pangkepang	Kabupaten Bangka Barat	68888000377000	23.176.000-01-01-17	29-Jan-18	Bulanan		2.159.039.000				618.854.000	1470.882.000	84,23%	57,37%	70,4%	Tidak Sesuai PKS
10	Sumatrababeling	Pangkepang	Kabupaten Bangka Tengah	68888000378004	118.176.000-01-01-18	15-Jan-18	Triwulanan		3.790.540.000				18.649.000	100,00%	99,70%	=====		
11	Sumatrababeling	Pangkepang	Kabupaten Bangka Selatan	68888000378004	114.176.000-01-01-18	15-Jan-18	Triwulanan		4.807.306.000				=====	=====	99,99%	49,99%	70,4%	Tidak Sesuai PKS
12	Sumatrababeling	Pangkepang	Kabupaten Belitung	68888000109005	17.176.000-01-01-18	2-Jan-18	Triwulanan		=====				115.410.000	99,51%	99,73%	=====		
13	Sumatrababeling	Pangkepang	Kabupaten Belitung Timur	68888000378001	Setun Sesuai PKS				9.665.750.000				1476.974.000	98,16%	89,93%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
14	Sumatrababeling	Prabumulih	Kota Prabumulih	68888000391000	456.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Triwulanan		148.718.000	74.888.000	74.794.000	74.841.000	48.000	99,88%	100,00%	=====		
15	Sumatrababeling	Prabumulih	Kabupaten Muara Enim	68888000393000	161.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Triwulanan		414.506.000	207.313.000	194.018.000	81.974.000	1108.074.000	99,83%	44,11%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
16	Sumatrababeling	Prabumulih	Kabupaten Ogan Komering Ulu	68888000393018	185.176.000-01-09-17	Ok 2017 - Sept 2018	Triwulanan		3.759.818.000				35.000	99,99%	100,00%	=====		
17	Sumatrababeling	Prabumulih	Kabupaten Ogan Komering Ulu	68888000413000	281.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Bulanan		499.898.000	149.849.000	149.780.000	149.737.000	117.000	99,97%	99,99%	=====		
18	Sumatrababeling	Prabumulih	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	68888000413000	431.176.000-01-01-18	Jan-Des 2018	Triwulanan		4.999.847.000				113.000	100,00%	100,00%	=====		
19	Sumatrababeling	Lubuk Linggau	Kabupaten Lahat	68888000398000	177.176.000-04-01-17	01/11/2017-31/12/2018	Triwulanan		2.769.752.000				32.299.000	99,15%	101,70%	=====		
20	Sumatrababeling	Lubuk Linggau	Kota Pangkalany	68888000393000	112.176.000-04-01-17	01/11/2017-31/12/2018	Triwulanan		1.937.109.000	769.602.500	644.174.000	230.000	1644.046.000	83,81%	0,04%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
21	Sumatrababeling	Lubuk Linggau	Kab. Empat Lintang	68888000413000	508.176.000-04-01-17	01/11/2017-31/12/2018	Triwulanan		1.945.314.000	772.661.000	772.271.000	388.331.000	1385.840.000	99,95%	50,03%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
22	Sumatrababeling	Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau	68888000398000	111.176.000-04-01-17	1/10/2017-31/12/2018	Triwulanan		2.699.812.000				=====	=====	99,99%	0,00%	70,4%	Tidak Sesuai PKS
23	Sumatrababeling	Lubuk Linggau	Kab. Muaraenim	68888000398000	161.176.000-04-01-17	1/10/2017-31/12/2018	Bulanan		1.654.000.000	818.000.000	817.839.000	414.000.000	1413.599.000	99,98%	50,01%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
24	Sumatrababeling	Lubuk Linggau	Kab. Muaraenim Utara	68888000378000	314.176.000-04-01-17	1/01/2018-31/12/2018	Triwulanan		882.814.000	441.481.000	441.278.000	441.481.000	184.000	99,96%	100,04%	=====		
25	Sumatrababeling	Bengkulu	Kota Bengkulu	68888000397000	176.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Triwulanan		2.676.408.000				=====	=====	101,03%	0,00%	70,4%	Tidak Sesuai PKS
26	Sumatrababeling	Bengkulu	Kab. Kaur	68888000402000	168.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Periode I (Jan-Jun) Periode II (Jul-Des)		1.354.696.000	637.348.000	583.004.000	637.210.000	44.106.000	92,93%	107,38%	=====		
27	Sumatrababeling	Bengkulu	Kab. Mukomuko	68888000402000	265.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Periode I (Jan-Jun) Periode II (Jul-Des)		1.537.113.000	768.556.500	768.384.000	1769.384.000	=====	99,98%	0,00%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
28	Sumatrababeling	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	68888000448000	147.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Tahunan		1.960.680.000	690.360.000	678.613.000	=====	=====	99,78%	0,00%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
29	Sumatrababeling	Bengkulu	Kab. Seluma	68888000401001	175.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Tahunan		3.383.812.000			886.897.000	1481.311.000	114,79%	64,81%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
30	Sumatrababeling	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	68888000394002	173.176.000-01-01-17	Jan-Des 2018	Periode I (Jan-Jun) Periode II (Jul-Des)		3.443.916.000				=====	=====	97,60%	180,81%	=====	
31	Sumatrababeling	Camp	Kab. Tapanuli	68888000441003	157.176.000-06-01-16	Jan-Agust 2018	Tahunan		1.661.195.000				666.333.000	150,07%	133,36%	=====		
32	Sumatrababeling	Camp	Kab. Labang	68888000395000	254.176.000-06-01-18	Feb 2018-Jan 2019	Tahunan		8.848.716.550				=====	=====	73,26%	205,28%	=====	
33	Sumatrababeling	Camp	Kab. Tanggabeling	68888000395000	156.176.000-06-01-17	Jan-Des 2018	Tahunan		3.218.008.000				=====	=====	100,00%	169,40%	=====	
34	Sumatrababeling	Camp	Kab. Bengkulu Utara	68888000396004	87.176.000-06-10-17	Nov 2017-Ok 2018	Tahunan		650.912.000	315.956.000	315.519.000		1315.519.000	99,87%	0,00%	70,4%	Tidak Sesuai PKS	
35				TOTAL										99,18%	94,52%			

Gambar III.9 Lampiran Proyeksi Pendapatan Iuran Jamkesda Daerah Sumatera Selatan

Sumber: Diolah oleh praktikan

4. Memverifikasi data iuran peserta yang harus dikembalikan (*refund*)

Pada dasarnya semua aktivitas pasti tidak luput dari kesalahan. Beberapa transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga terjadi kesalahan antara lain pembayaran double, iuran yang masih tertagih bagi peserta yang sudah meninggal dunia, dan pembayaran iuran yang sudah dilakukan peserta namun belum diterima oleh BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat terjadi di semua segmen peserta BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, Manajemen Iuran Bidang *Settlement* bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya yaitu harus mengembalikan iuran peserta ke rekening peserta (*refund*). Pada peserta yang meninggal dunia, mereka terdaftar pada PBPUP kolektif sehingga iuran yang sudah terbayar untuk bulan sesudah peserta meninggal dikembalikan ke rekening penanggung iuran peserta tersebut.

Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan antara lain:

- Praktikan diberikan data iuran yang harus dikembalikan oleh pegawai bidang *settlement*

- b. Kemudian praktikan memverifikasi data tersebut apakah pembayaran iuran dubel, belum terbayar, atau sesuai menggunakan aplikasi keuangan
- c. Untuk proses *refund* kepada peserta yang sudah meninggal dunia, praktikan melakukan cek kembali apakah dokumen persyaratan lengkap dan apakah pembayaran bulan setelah peserta meninggal dunia sudah terbayar atau belum
- d. Membuat laporan.

	B	C	D	E	F	G
	Nomor VA	Nama Peserta	Nominal (Rp)	Tanggal Transfer	Bank	
2	8988890001200001	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	Rp118.681.125	05/07/2017	Mandiri	
3	8988890002240302	Kas Umum Daerah Pemkot Cilegon	Rp1.937.266.675	05/07/2017	Mandiri	
4	8888801452143057	Salpul	Rp834.000	07/07/2017	Mandiri	
5	8888801882170641	Kusmadi	Rp173.500	07/07/2017	Mandiri	
6	8888801444198432	Sri Indrayati	Rp956.570	07/07/2017	Mandiri	
7	8888801265070284	Forthycia Flora	Rp461.550	07/07/2017	Mandiri	
8	8888801306392186	Nuraini	Rp535.500	07/07/2017	Mandiri	
9	8888801276500429	Tukiman	Rp382.500	07/07/2017	Mandiri	
10	8988801820956149	Kevin Bonardo Manurung	Rp457.500	07/07/2017	Mandiri	
11	8988801820956048	Raider Manurung Ir	Rp457.500	07/07/2017	Mandiri	
12	8988801820955958	Rotua Napitupulu	Rp457.500	07/07/2017	Mandiri	
13	8888801820956083	Titania Rose Maranatha Manurung	Rp457.500	07/07/2017	Mandiri	
14	8988801270686249	Hamonangan Simamora	Rp654.500	07/07/2017	Mandiri	
15	8988801270686677	Tiomen Banjarnahor	Rp714.000	07/07/2017	Mandiri	
16	898880136048929	Parmela Felita Santoso	Rp714.000	07/07/2017	Mandiri	
17	8988801461632949	Yahman Sudjadi	Rp255.000	07/07/2017	Mandiri	
18	8988801461633399	Sugiati	Rp255.000	07/07/2017	Mandiri	
19	8888801424924842	Sudjarno	Rp122.500	07/07/2017	Mandiri	
20	8888801390669222	Nahuri	Rp250.000	07/07/2017	Mandiri	
21	8888890000340001	Jamkesda Kota Sibolga	Rp15.163.525	13/07/2017	Mandiri	
22	8888890001640194	Jamkesda Kota Kendal	Rp23.000	13/07/2017	Mandiri	
23	8888890001460095	Jamkesda Purworejo	Rp184.000	13/07/2017	Mandiri	
24	8888890001480518	Jamkesda Kota Magelang	Rp1.835.000	13/07/2017	Mandiri	
25	8888890001440101	Jamkesda Kota Banjarnegara	Rp161.000	13/07/2017	Mandiri	
26	8888890001430179	Jamkesda Kota Purbalingga	Rp161.000	13/07/2017	Mandiri	
27	8888890001690221	Jamkesda Kab Brebes	Rp23.000	13/07/2017	Mandiri	
28	8888890001200001	Jamkesda Kab Bandung	Rp118.681.125	13/07/2017	Mandiri	

Gambar III.10 Lampiran Data Iuran Peserta yang Harus Dikembalikan Karena Pembayaran Dubel Melalui Bank Mandiri

Sumber: Diolah oleh praktikan

3.3. Kendala Yang Dihadapi

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, praktikan tidak lepas dari kendala-kendala yang mengganggu kelancaran kegiatan PKL. Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama PKL adalah:

- a. Kurangnya *job clarity* ketika praktikan pertama kali memulai PKL. Praktikan hanya diinstruksikan untuk membantu pekerjaan di Manajemen Iuran, tanpa merincikan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan belum mempunyai suatu program khusus untuk mahasiswa yang melaksanakan PKL dalam bidang manajerial.
- b. Pekerjaan yang diberikan kurang beragam. Hal ini mungkin disebabkan karena bidang keuangan di perusahaan memiliki data perusahaan yang bersifat rahasia sehingga mahasiswa yang melaksanakan PKL tidak diberikan pekerjaan yang bersifat vital dan sensitif.
- c. Praktikan sering ditinggal rapat kerja di luar oleh pembimbing karena Manajemen Iuran khususnya bidang yang praktikan tempati memiliki peran paling vital di BPJS Kesehatan untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang sedang viral di publik. Oleh karena itu, praktikan terkadang memiliki banyak waktu luang.

3.4. Cara Mengatasi Kendala

Walaupun terdapat kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan PKL di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, tetapi praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik dan lancar, adapun cara praktikan mengatasi kendala-kendala selama melaksanakan PKL adalah:

- a. Berkomunikasi secara aktif dengan pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan, meminta saran dan masukan, serta berkoordinasi dengan baik, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan bisa diselesaikan dengan baik.
- b. Melaksanakan apapun tugas-tugas yang diberikan oleh kantor. Kemudian praktikan secara aktif juga berkomunikasi menawarkan bantuan sehingga terjalin hubungan yang baik antara praktikan dengan para karyawan, serta praktikan dapat belajar banyak mengenai pekerjaan para karyawan BPJS Kesehatan terutama pada Manajemen Iuran.
- c. Menawarkan bantuan kepada karyawan di departemen lain yaitu bidang *settlement* sehingga waktu luang praktikan dapat dimanfaatkan dengan efektif. Selain itu, praktikan juga mendapatkan ilmu dan pengalaman dari bidang *settlement* serta hubungan baik dengan karyawan di bidang *settlement*.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan PKL di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, praktikan mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja nyata. Dari PKL yang telah dijalani, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan memperoleh banyak manfaat dan pelajaran yang tidak diperoleh saat perkuliahan, seperti cara bersosialisasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan kerja, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis.
2. Praktikan mulai mengenal kondisi dunia kerja nyata, khususnya di BPJS Kesehatan, terutama di Departemen Manajemen Iuran. Praktikan bisa beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan kerja yang ketat dan strategis namun tetap membangun di institusi BUMN. Selain itu, praktikan juga mengetahui masalah utama penyebab defisit anggaran pada BPJS Kesehatan yaitu karena disebabkan oleh peserta BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran.
3. Praktikan berhasil menciptakan, mengasah, dan membangun sifat-sifat dan kompetensi yang penting untuk dimiliki ketika memasuki dunia kerja, seperti rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta sifat *flexible*, *adaptable*, dan *dependable* dalam diri praktikan.

4.2. Saran

1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta

- a. Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Manajemen, diharapkan dapat memberikan rekomendasi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL), terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta.
- b. Sebaiknya pemberian dosen pembimbing dilakukan sebelum Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung, baik untuk mahasiswa yang melaksanakan PKL di libur awal tahun maupun pertengahan tahun. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mahasiswa/i dalam melakukan *sharing* untuk proses pencarian tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan pelaksanaannya.
- c. Pihak Fakultas dan Universitas lebih mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk pembuatan surat izin pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

2. Saran untuk Mahasiswa

- a. Melatih dan meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama yang baik dengan orang lain, khususnya dalam dunia kerja.
- b. Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), sebaiknya mahasiswa memahami terlebih dahulu bidang pekerjaan di tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar merasa lebih siap saat pelaksanaannya.
- c. Tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan segala rangkaian Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- d. Memulai untuk memperluas jaringan komunikasi agar lebih mudah mencari dan mendapatkan tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL).

3. Saran untuk BPJS Kesehatan Kantor Pusat

- a. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Pusat dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yang sedang melakukan PKL, terutama dalam bidang manajerial, sehingga mahasiswa/i mudah dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

FE UNJ. (2014). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: FE UNJ.

Tentang Perusahaan. (2018). Diakses pada 04 Oktober 2018 dari <http://bpjs-kesehatan.go.id>.


Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan. (2018). Diakses pada 04 Oktober 2018 dari <http://bi.bpjs-kesehatan.go.id>.

Kuangan BPJS Kesehatan. (2018). Diakses pada 04 Oktober 2018 dari <http://keuangan.bpjs-kesehatan.go.id>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Lamaran PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon/Faksimile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
 BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
 Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
 Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : 1713/UN39.12/KM/2018 13 Juli 2018
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan


Yth. Sekretaris Badan BPJS Kesehatan Kantor Pusat
 Jl. Letjen Suprpto No.14 Cempaka Putih
 Jakarta Pusat 10510

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Farhan Aryo Abimanyu
 Nomor Registrasi : 8215155564
 Program Studi : Manajemen
 Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 No. Telp/HP : 081808869059

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 23 Juli s.d. 14 September 2018 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Wiro Sasmojo, SH
 NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Ekonomi
 2. Koordinator Prodi Manajemen

Lampiran 2

Daftar Hadir PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fekon.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
... SKS

Nama : FARHAN ARYO A.
No. Registrasi : 821515554
Program Studi : ST MANAJEMEN
Tempat Praktik : BPJS - KESEHATAN PUSAT
Alamat Praktik/Telp : Jl. Letjen Supriatno Kav. 20,
No. 14, Cempaka Putih, telp. 62 21 4212938

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Rabu / 01-08-2018	1. <i>fa</i>	
2.	Kamis / 02-08-2018	2. <i>fa</i>	
3.	Jum'at / 03-08-2018	3. <i>fa</i>	
4.	Senin / 05-08-2018	4. <i>fa</i>	
5.	Selasa / 06-08-2018	5. <i>fa</i>	
6.	Rabu / 08-08-2018	6. <i>fa</i>	Launching LCP
7.	Kamis / 09-08-2018	7. <i>fa</i>	
8.	Jum'at / 10-08-2018	8. <i>fa</i>	
9.	Senin / 13-08-2018	9. <i>fa</i>	
10.	Selasa / 14-08-2018	10. <i>fa</i>	
11.	Rabu / 15-08-2018	11. <i>fa</i>	
12.	Kamis / 16-08-2018	12. <i>fa</i>	
13.	Senin / 20-08-2018	13. <i>fa</i>	
14.	Kamis / 23-08-2018	14. <i>fa</i>	
15.	Jum'at / 24-08-2018	15. <i>fa</i>	

Jakarta, 27 Agustus 2018
Penilai,

Agung Dermawan

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan menandatangani cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2... SKS

Nama : FARHAN ARYO A
No. Registrasi : 0215155564
Program Studi : SI MANAJEMEN
Tempat Praktik : BPJS - KESEHATAN PUSAT
Alamat Praktik/Telp : Jl. Letjen. Suprpto Kav. 20,
No. 11, Cempaka Putih / +62 21 9212938

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin / 27-08-2018	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa / 28-08-2018	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu / 29-08-2018	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis / 30-08-2018	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jum'at / 31-08-2018	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin / 03-09-2018	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa / 04-09-2018	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu / 05-09-2018	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis / 06-09-2018	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jum'at / 07-09-2018	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin / 10-09-2018	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Rabu / 12-09-2018	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Kamis / 13-09-2018	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Jum'at / 14-09-2018	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Selasa / 18-09-2018	15. <i>[Signature]</i>	

Jakarta, 18 September 2018
Penilai



Agung Dermawan

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
... 2 ... SKS

Nama : FARHAN ARYO A.
No. Registrasi : 825155564
Program Studi : S1. MANAJEMEN
Tempat Praktik : BPJS. KESEHATAN PUSAT
Alamat Praktik/Telp : Jl. Letjen Suprapto Kav. 20
No. 19, Cempaka Putih / telp 21 4212938

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Rabu / 19 - 09 - 2018	1.	
2.	Kamis / 20 - 09 - 2018	2.	
3.	Jum'at / 21 - 09 - 2018	3.	
4.	Selasa / 25 - 09 - 2018	4.	
5.	Rabu / 26 - 09 - 2018	5.	
6.	Kamis / 27 - 09 - 2018	6.	
7.	Jum'at / 28 - 09 - 2018	7.	
8.	Senin / 01 - 10 - 2018	8.	
9.	Selasa / 02 - 10 - 2018	9.	
10.	Rabu / 03 - 10 - 2018	10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	

Jakarta, 03 Oktober 2018
Penilai





Agung Dermawan.

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 3

Daftar Nilai PKL

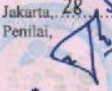

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
 Laman: www.fe.unj.ac.id



PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
...3... SKS

Nama : FARHAN ARYO A.
 No.Registrasi : 8215155569
 Program Studi : S1 MANAJEMEN
 Tempat Praktik : BPJS - KESEHATAN PUSAT
 Alamat Praktik/Telp : Jl. Letjen. Supratno, Kav. 20, No. 14, Cempaka Putih, 462 21 4212938


NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN				
1	Kehadiran	98	1. Keterangan Penilaian :				
2	Kedisiplinan	98	Skor Nilai Bobot 86-100 A 4 81-85 A- 3,7 76-80 B+ 3,3 71-75 B 3,0 66-70 B- 2,7 61-65 C+ 2,3 56-60 C 2,0 51-55 C- 1,7 46-50 D 1				
3	Sikap dan Kepribadian	99					
4	Kemampuan Dasar	99					
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	100					
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	99	2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	99	Nilai Rata-rata :				
8	Aktivitas dan Kreativitas	99	$\frac{990}{10 \text{ (sepuluh)}} = 99$				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	100					
10	Hasil Pekerjaan	99	Nilai Akhir :				
			<table border="1"> <tr> <td>99</td> <td>Sembilan puluh sembilan</td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	99	Sembilan puluh sembilan	Angka bulat	huruf
99	Sembilan puluh sembilan						
Angka bulat	huruf						
	Jumlah	990					

Jakarta, 28 September 2018
 Penilai,

 Agung Dermawan.

Catatan :
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4

Surat Keterangan Selesai PKL

 **BPJS Kesehatan**
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SURAT KETERANGAN
Nomor: **12498** /IV.1/1018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helti Endrasari K.
NPP : 02493
Jabatan : Plh. Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Non PPU dan PBI



Dengan ini menerangkan dengan benar kepada:

Nama : Farhan Aryo Abimanyu
NIM : 8215155564
Universitas : Universitas Negeri Jakarta
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / S1 Manajemen

Bahwa yang bersangkutan **bukan** merupakan karyawan BPJS Kesehatan dan telah melaksanakan PKL di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Kedeputan Bidang Manajemen Iuran Non PPU dan PBI terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Oktober 2018



Helti Endrasari K.
Plh. Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Non PPU dan PBI

Kantor Pusat
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

Lampiran 5

Daftar Tugas Harian

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
1	Rabu, 01 Agustus 2018	a. Penjelasan mengenai BPJS Kesehatan b. Membaca laporan mengenai LCP c. Rapat dengan Traveloka	Mas Wawan
2	Kamis, 02 Agustus 2018	a. Memantau pendapatan iuran (<i>monitoring</i>) b. Memantau peserta autodebit (<i>monitoring</i>) c. Membuat <i>dashboard</i> pendapatan	Mas Wawan
3	Jumat, 03 Agustus 2018	a. Melakukan <i>monitoring</i> b. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus c. Membuat <i>feedback</i> untuk setiap kantor Kedeputian Wilayah	Mas Wawan
4	Senin, 06 Agustus 2018	a. Melakukan <i>monitoring</i> b. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus	Mas Wawan

5	Selasa, 07 Agustus 2018	a. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus b. Melakukan <i>monitoring</i>	Mas Wawan
6	Rabu, 08 Agustus 2018	a. <i>Launching</i> LCP bersama mitra BPJS Kesehatan (Traveloka, Kopnus, Bank Mandiri, BNI, dll)	Direktur Keuangan dan Investasi (Pak Kemal)
7	Kamis, 09 Agustus 2018	a. Merekapitulasi program <i>Telecollecting</i> , <i>SMS Blast</i> , dan upaya pengumpulan tunggakan iuran lainnya dari 13 wilayah b. Melakukan <i>monitoring</i>	Mas Wawan
8	Jumat, 10 Agustus 2018	1. Memverifikasi data iuran peserta yang harus di- <i>refund</i> 2. Melakukan <i>monitoring</i>	Mas Wawan, Mas Nurul
9	Senin, 13 Agustus 2018	1. Menyunting dan mempelajari surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan mitra	Bu Helti
10	Selasa, 14 Agustus 2018	1. Melakukan <i>monitoring</i>	Mas Wawan
11	Rabu, 15 Agustus 2018	1. Melakukan <i>monitoring</i>	Mas Wawan
12	Kamis, 16 Agustus 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka 2. Melakukan <i>monitoring</i>	Mas Wawan
13	Senin, 20 Agustus 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan

		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
14	Kamis, 23 Agustus 2018	1.	Merekapitulasi data upaya pengumpulan tunggakan iuran	Mas Wawan
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
15	Jumat, 24 Agustus 2018	1.	Memverifikasi data <i>feedback refund</i> peserta Jamkesda	Mas Arnold
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
16	Senin, 27 Agustus 2018	1.	Membuat <i>module FAQ Frequently Asked Question</i>	Pak Garnon
17	Selasa, 28 Agustus 2018	1.	Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
18	Rabu, 29 Agustus 2018	1.	Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
19	Kamis, 30 Agustus 2018	1.	Memverifikasi data iuran peserta yang harus di- <i>refund</i>	Mas Wawan, Mas Arnold
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
20	Jumat, 31 Agustus 2018	1.	Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
		3.	Membuat <i>dashboard</i> penerimaan iuran	
21	Senin, 03 September 2018	1.	Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas awan
		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
22	Selasa, 04	1.	Memverifikasi data iuran	Mas Wawan,

	September 2018	1. Jamkesda	Mas Hamim
		2. Melakukan <i>monitoring</i>	
23	Rabu, 05 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
		2. Melakukan <i>monitoring</i>	
24	Kamis, 06 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Wawan, Mas Hamim
		2. Melakukan <i>monitoring</i>	
25	Jumat, 07 September 2018	1. Memantau pengumpulan iuran Jamkesda	Mas Hamim, Mas Arnold
		2. Memverifikasi data iuran yang harus di- <i>refund</i> karena peserta yang meninggal	
26	Senin, 10 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Hamim, Mas Arnold
		2. Memverifikasi data iuran yang harus di- <i>refund</i>	
27	Rabu, 12 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
		2. Melakukan <i>monitoring</i>	
28	Kamis, 13 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
		2. Melakukan <i>monitoring</i>	
29	Jumat, 14 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Wawan, Mas Hamim
		2. Melakukan <i>monitoring</i>	
30	Selasa, 18 September 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan

		2.	Melakukan <i>monitoring</i>	
31	Rabu, 19 September 2018	1. 2.	Melakukan <i>monitoring</i> Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
32	Kamis, 20 September 2018	1.	Merekapitulasi tagihan pembayaran rumah sakit	Mas Isrok
33	Jumat, 21 September 2018	1. 2.	Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda Merekapitulasi tagihan pembayaran rumah sakit	Mas Hamim, Mas Isrok
34	Selasa, 25 September 2018	1. 2.	Melakukan <i>monitoring</i> Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka	Mas Wawan
35	Rabu, 26 September 2018	1. 2.	Merekapitulasi dan memverifikasi data dari Kopnus dan Traveloka Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Wawan, Mas Hamim
36	Kamis, 27 September 2018	1.	Kunjungan ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur	Mas Wawan
37	Jumat, 28 September 2018	1. 2.	Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda Membuat <i>dashboard</i> penerimaan	Mas Wawan
38	Senin, 01 Oktober 2018	1.	Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Wawan
39	Selasa, 02 Oktober 2018	1.	Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Wawan

40	Rabu, 03 Oktober 2018	1. Merekapitulasi dan memverifikasi data Jamkesda	Mas Wawan
----	--------------------------	--	-----------